

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI GAMPONG DAYAH TANOH KECAMATAN GLUMPANG TIGA KABUPATEN PIDIE

Jumadil Akbar¹⁾, Teuku Zulyadi²⁾, Hijrah Saputra³⁾

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Email: 19040507@student.ar-raniry.ac.id, teukuzulyadi@ar-raniry.ac.id, hijrah.saputra@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Program Kartu Prakerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Dayah Tanoh, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap empat orang warga penerima Program Kartu Prakerja. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pemahaman, motivasi, serta pemanfaatan program oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi mengenai Program Kartu Prakerja umumnya diperoleh melalui media sosial tanpa adanya sosialisasi formal dari pemerintah desa. Motivasi utama masyarakat dalam mengikuti program lebih didominasi oleh keinginan untuk memperoleh insentif dibandingkan peningkatan keterampilan kerja. Pelatihan yang diikuti cenderung bersifat formalitas, sementara insentif yang diterima lebih banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada pengembangan usaha atau peningkatan kapasitas ekonomi. Selain itu, tidak ditemukan adanya pengawasan maupun pendampingan lanjutan dari pemerintah desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Kartu Prakerja memberikan manfaat finansial jangka pendek, namun belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pengawasan, serta penyesuaian program dengan kebutuhan riil masyarakat desa.

Kata Kunci: Kartu Prakerja; Kesejahteraan Masyarakat; Kebijakan Publik; Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of the Pre-Employment Card Program (Kartu Prakerja) in improving community welfare in Gampong Dayah Tanoh, Glumpang Tiga District, Pidie Regency. This research employs a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews with four beneficiaries of the Pre-Employment Card Program. The data were analyzed descriptively to examine participants' understanding, motivations, and utilization of the program. The findings indicate that information about the program was predominantly obtained through social media, with no formal socialization conducted by the village government. The primary motivation for participation was largely driven by the desire to receive financial incentives rather than to enhance job-related skills. Most participants attended the training merely as a formality, while the incentives received were mainly used to meet daily needs instead of supporting business development or economic capacity building. Furthermore, no monitoring or follow-up assistance from the village government was identified. This study concludes that although the Pre-Employment Card Program provides short-term financial benefits, it has not yet been fully effective in sustainably empowering the community. Therefore, improvements are required in terms of socialization, supervision, and alignment of program objectives with the actual needs of rural communities.

Keywords: Pre-Employment Card Program; Community Welfare; Public Policy; Community Empowerment.

PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan krusial yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial. Rendahnya akses terhadap lapangan kerja yang layak tidak hanya memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga, tetapi juga menghambat pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk menekan angka pengangguran menjadi perhatian utama dalam kebijakan publik di Indonesia. Tingkat pengangguran yang tinggi diketahui memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Huda & Sa'roni, 2024).

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Kartu Prakerja melalui Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja. Program ini dirancang sebagai bentuk bantuan sosial bersyarat yang menggabungkan pelatihan keterampilan berbasis digital dan pemberian insentif bagi masyarakat usia produktif, khususnya pencari kerja, korban pemutusan hubungan kerja, serta pekerja yang ingin meningkatkan kompetensinya. Di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi, program ini diharapkan mampu memperluas akses pelatihan serta membuka peluang kerja mandiri maupun formal bagi masyarakat.

Implementasi Program Kartu Prakerja di berbagai daerah menunjukkan capaian yang berbeda-beda. Di wilayah perkotaan, pelaksanaan program relatif berjalan dengan baik karena didukung oleh infrastruktur digital yang memadai dan tingkat literasi teknologi yang lebih tinggi. Sementara itu, di wilayah perdesaan seperti Gampong Dayah Tanoh, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, efektivitas program masih perlu ditinjau secara kritis. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi, keterbatasan fasilitas internet, serta hambatan administratif sering kali menjadi tantangan dalam pelaksanaan program di tingkat lokal.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (George C. Edwards III, 1980). Apabila salah satu komponen tersebut tidak berjalan secara optimal, maka kebijakan berisiko gagal diterapkan secara efektif di

lapangan. Kerangka pemikiran ini menjadi dasar analisis dalam menilai efektivitas pelaksanaan Program Kartu Prakerja di tingkat desa.

Selain itu, hasil penelitian oleh Siti Dwi Yana (2021) dalam Jurnal Investasi Islam menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses teknologi dan rendahnya literasi digital. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi implementasi program pada tingkat lokal sebagai bahan perbaikan kebijakan.

Gampong Dayah Tanoh merupakan salah satu desa di Kabupaten Pidie yang menjadi sasaran pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Meskipun sejumlah warga telah terdaftar sebagai penerima manfaat, belum terdapat kajian yang secara khusus menelaah sejauh mana program ini mampu berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada analisis implementasi Program Kartu Prakerja di Gampong Dayah Tanoh serta dampaknya terhadap peningkatan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bahwa implementasi Program Kartu Prakerja di Gampong Dayah Tanoh belum berjalan secara optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama ditinjau dari aspek sosialisasi program, partisipasi peserta dalam pelatihan, pemanfaatan insentif, serta pengawasan dan pendampingan dari pemerintah desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai implementasi Program Kartu Prakerja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong Dayah Tanoh, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu menggali makna dan pengalaman langsung dari warga penerima manfaat program secara holistik. Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Dayah Tanoh, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, pada rentang waktu Juli hingga Agustus 2025. Lokasi ini dipilih karena terdapat warga desa yang telah mengikuti dan merasakan langsung manfaat Program Kartu Prakerja, sehingga relevan untuk

mengkaji implementasi kebijakan di tingkat desa. Informan penelitian berjumlah empat orang warga Gampong Dayah Tanoh yang dipilih secara purposive dengan pertimbangan bahwa mereka merupakan penerima manfaat aktif dan memiliki pengalaman lengkap mulai dari proses pendaftaran, pelaksanaan pelatihan, penerimaan insentif, hingga pemanfaatan hasil pelatihan. Keempat informan tersebut terdiri atas dua laki-laki dan dua perempuan dengan rentang usia 29–38 tahun serta latar belakang pekerjaan yang beragam, yaitu buruh bangunan, ibu rumah tangga, petani, dan penjual kelontong, sehingga mampu memberikan gambaran yang representatif terkait pelaksanaan program. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan panduan semi-terstruktur yang disusun berdasarkan indikator teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi lapangan dan dokumentasi guna memperkuat serta memverifikasi data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi tematik dan tabel, serta penarikan kesimpulan secara bertahap. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik untuk meningkatkan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik wawancara mendalam terhadap empat warga Gampong Dayah Tanoh yang telah mengikuti Program Kartu Prakerja. Proses wawancara dilakukan secara langsung untuk menggali secara komprehensif pengalaman individu serta pandangan mereka terhadap pelaksanaan dan efektivitas program di tingkat desa.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014), yang terdiri atas tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengelola dan menafsirkan data secara sistematis, menyeluruh, dan kontekstual. Validitas temuan diperkuat melalui teknik triangulasi

sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan serta memadukannya dengan dokumentasi dan observasi lapangan.

1. Akses Informasi Program

Seluruh informan memperoleh informasi tentang program Kartu Prakerja melalui media sosial dan rekomendasi dari teman sebaya. Hal ini menunjukkan bahwa media digital menjadi saluran utama penyebaran informasi program. Namun, ketidakhadiran sosialisasi formal dari pemerintah desa atau instansi terkait menimbulkan ketimpangan informasi di kalangan masyarakat desa yang kurang akrab dengan teknologi. Temuan ini memperkuat teori komunikasi kebijakan publik, bahwa keterbukaan informasi menjadi salah satu indikator utama keberhasilan implementasi kebijakan (Edward III, 1980).

2. Motivasi Pendaftaran

Tujuan utama pendaftaran didominasi oleh harapan untuk mendapatkan insentif, bukan peningkatan keterampilan kerja. Hanya satu dari empat responden yang menyatakan bahwa ia mendaftar karena ingin memperoleh pelatihan kerja. Hal ini menunjukkan pergeseran orientasi masyarakat dari aspek peningkatan kompetensi ke aspek bantuan finansial, yang menunjukkan kurangnya internalisasi tujuan kebijakan kepada penerima manfaat.

3. Pemilihan dan Kualitas Pelatihan

Jenis pelatihan yang diambil beragam, seperti pelatihan digital marketing dan kewirausahaan. Namun, hanya satu responden yang mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh. Sisanya mengakui bahwa mereka hanya menyelesaikan pelatihan secara formalitas demi memperoleh insentif. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan tidak optimalnya evaluasi kualitas pelatihan dari pihak penyelenggara, serta kurangnya motivasi intrinsik dari peserta.

4. Penggunaan Insentif

Tiga dari empat informan menggunakan insentif yang diterima dari program Kartu Prakerja untuk memenuhi kebutuhan harian, seperti membeli sembako, sedangkan satu informan lainnya memanfaatkannya sebagai modal untuk usaha kecil. Temuan ini mencerminkan bahwa kondisi ekonomi sebagian besar penerima manfaat masih tergolong rentan. Oleh karena itu, dalam konteks lokal Gampong

Dayah Tanoh, program Kartu Prakerja cenderung lebih dirasakan sebagai bentuk bantuan sosial daripada sebagai instrumen peningkatan kompetensi kerja. Lebih lanjut, temuan ini tidak hanya merefleksikan situasi ekonomi peserta, tetapi juga menunjukkan pola umum dalam implementasi program dari berbagai dimensi lainnya. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai hal tersebut, Tabel 1 di bawah ini menyajikan ringkasan hasil wawancara terhadap keempat informan berdasarkan sejumlah aspek kunci implementasi program.

Tabel 1. Rakapitulasi Temuan Wawancara Program Kartu Prakerja Pada Tingkat Desa

Aspek yang Ditanyakan	Temuan Umum (4 Responden)
Sumber Informasi	Mayoritas mengetahui dari media sosial seperti Facebook dan WhatsApp, tidak ada sosialisasi resmi.
Motivasi Mendaftar	Ingin mendapatkan insentif dan pelatihan, insentif menjadi alasan utama
Jenis Pelatihan & Keseriusan Mengikuti	Pelatihan yang diambil beragam (digital marketing, usaha mikro). Sebagian besar diikuti secara formalitas.
Pemanfaatan Insentif	Digunakan untuk kebutuhan harian, bukan modal modal usaha.
Sosialisasi Lanjutan	Tidak ada, program diketahui secara mandiri tanpa dorongan dari aparat desa.
Kesesuaian Sasaran Program	Program dianggap bermanfaat, tapi masih belum tepat sasaran karena banyak warga yang tidak tahu.
Pengawasan Program	Tidak ada pengawasan lanjutan dari pihak desa atau pemerintah setelah program berjalan.

5. Sosialisasi dan Pengawasan

Keempat informan menyatakan bahwa tidak ada sosialisasi lanjutan maupun pendampingan dari pemerintah daerah maupun perangkat desa terkait kelanjutan program. Minimnya keterlibatan institusi lokal dalam monitoring program menjadi salah satu kendala implementasi di tingkat akar rumput. Dalam teori implementasi kebijakan Edward III, aspek sumber daya dan struktur birokrasi lokal sangat berpengaruh dalam keberhasilan sebuah program.

6. Ketepatan Sasaran dan Efektivitas Program

Para informan menilai bahwa program Kartu Prakerja belum sepenuhnya tepat sasaran, sebab mereka mengenal beberapa peserta lain yang secara

ekonomi lebih mampu namun tetap menerima bantuan. Selain itu, karena tidak ada tindak lanjut pasca pelatihan, peserta cenderung tidak mengalami perubahan signifikan dalam status ketenagakerjaan. Ini sejalan dengan hasil riset sebelumnya oleh Yusuf & Handayani (2023) yang menyebutkan bahwa ketidaktepatan sasaran dan absennya skema pasca- program menjadi dua faktor utama yang melemahkan daya guna program Prakerja.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Kartu Prakerja di Gampong Dayah Tanoh masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan kultural yang memengaruhi efektivitasnya sebagai instrumen peningkatan kompetensi kerja. Dominannya akses informasi melalui media sosial menegaskan pergeseran pola komunikasi kebijakan publik ke ranah digital, namun sekaligus memperlihatkan eksklusi informasi bagi kelompok masyarakat desa yang memiliki keterbatasan literasi digital. Studi Taufik dan Nugroho (2019) serta Winarno (2020) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada mekanisme sosialisasi yang inklusif dan berlapis, terutama pada wilayah perdesaan yang masih membutuhkan peran aktif aparatur lokal. Dalam konteks ini, minimnya peran pemerintah desa memperlemah fungsi transmisi kebijakan sebagaimana dikemukakan dalam model implementasi Edward III.

Motivasi pendaftaran yang didominasi oleh orientasi insentif mengindikasikan terjadinya distorsi tujuan kebijakan. Program yang sejatinya dirancang untuk peningkatan keterampilan kerja justru dipersepsikan sebagai bantuan tunai sementara. Fenomena ini sejalan dengan temuan Pratiwi dan Hidayat (2021) serta Rachman et al. (2020) yang menyatakan bahwa kondisi kerentanan ekonomi pascapandemi mendorong masyarakat memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar dibandingkan investasi jangka panjang pada pengembangan kapasitas diri. Lemahnya internalisasi tujuan kebijakan juga mencerminkan kurang optimalnya komunikasi substansi program kepada kelompok sasaran.

Pada aspek kualitas pelatihan, rendahnya keseriusan peserta dalam mengikuti pelatihan menunjukkan adanya persoalan pada desain insentif dan sistem pengawasan. Beberapa studi evaluatif (Yusuf & Handayani, 2023; Sari & Kurniawan, 2021) menekankan bahwa tanpa mekanisme evaluasi pembelajaran dan

pendampingan pascapelatihan, program pelatihan berbasis daring berpotensi menjadi kegiatan administratif semata. Hal ini diperkuat oleh temuan Nugroho dan Hartono (2019) yang menyatakan bahwa efektivitas program pengembangan SDM sangat ditentukan oleh kesinambungan antara pelatihan, pendampingan, dan akses peluang kerja.

Pemanfaatan insentif yang lebih banyak digunakan untuk konsumsi harian menegaskan bahwa dalam konteks lokal desa, Kartu Prakerja berfungsi menyerupai skema bantuan sosial. Kondisi ini bukan semata-mata kesalahan peserta, melainkan refleksi dari ketidaksiapan ekosistem pendukung program di tingkat lokal (Wibowo, 2022). Ketiadaan sosialisasi lanjutan, monitoring, dan pendampingan usaha menunjukkan lemahnya kapasitas institusi lokal dalam mendukung implementasi kebijakan nasional. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Grindle (2018) dan Ansell dan Gash (2018), keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh keterlibatan aktor lokal dan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, efektivitas Program Kartu Prakerja di tingkat desa menuntut penguatan peran pemerintah desa, integrasi data penerima manfaat, serta pengembangan skema pascaprogram agar tujuan peningkatan kompetensi dan kemandirian ekonomi dapat tercapai secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini adalah bahwa program ini belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Akses informasi yang terbatas, orientasi peserta yang lebih fokus pada insentif ketimbang pelatihan, serta minimnya pengawasan dan sosialisasi lanjutan menunjukkan lemahnya pelaksanaan program di tingkat akar rumput. Pelatihan yang disediakan cenderung diselesaikan secara formalitas dan belum diinternalisasi sebagai sarana peningkatan kapasitas kerja. Penggunaan insentif oleh mayoritas peserta untuk kebutuhan konsumtif juga mengindikasikan bahwa program ini lebih dirasakan sebagai bantuan sosial ketimbang sebagai program pengembangan kompetensi tenaga kerja. Selain itu, ketidaktepatan sasaran dan absennya tindak lanjut pasca pelatihan

semakin memperlemah dampak jangka panjang program terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Temuan ini menguatkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, khususnya pada aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi lokal yang belum optimal dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik berbasis digital di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, A. (2019). *Implementasi kebijakan publik: Teori dan praktik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ansell, C., & Gash, A. (2018). *Collaborative platforms as a governance strategy*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), 16–32.
- Dianita, M. (2021). Pengaruh program Kartu Prakerja terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 8(2), 123–134.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. S. (2018). *Politics and policy implementation in the third world*. Princeton: Princeton University Press.
- Huda, N., & Sa'roni, M. (2024). Pengaruh tingkat pengangguran terhadap kesejahteraan sosial di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 25(1), 14–28.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Nugroho, R., & Hartono, D. (2019). Evaluasi kebijakan pengembangan sumber daya manusia. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 101–115.
- Pratiwi, A., & Hidayat, R. (2021). Efektivitas Program Kartu Prakerja di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 6(1), 45–58.
- Rachman, F., Suryadi, B., & Lestari, T. (2020). Bantuan sosial dan ketahanan ekonomi rumah tangga. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 21(3), 233–245.
- Rohman, F., & Anwar, C. (2022). Tinjauan efektivitas program Kartu Prakerja dalam pemberdayaan tenaga kerja muda. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 12(1), 34–45.
- Sari, M., & Kurniawan, A. (2021). Pelatihan daring dan tantangan evaluasi pembelajaran. *Jurnal Pendidikan dan Pelatihan*, 5(2), 77–89.
- Taufik, T., & Nugroho, H. (2019). Komunikasi kebijakan publik di era digital. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 1–14.
- Wibowo, E. (2022). Kartu Prakerja dan dinamika kebijakan ketenagakerjaan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 120–134.
- Yusuf, R., & Handayani, T. (2023). Evaluasi program Kartu Prakerja: Perspektif sosial ekonomi dan ketepatan sasaran. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 5(1), 45–59.